

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL PADA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Shelpy Khairidayanti¹, Arpandi², Barkatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: shelpykhairidayanti14@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial adalah sebuah pendekatan layanan perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai kebutuhan lokal. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Perpustakaan telah mengimplementasikan program ini sejak 2021 hingga sekarang. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan sampel secara *snowball sampling* berjumlah 23 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kurang efektif, dilihat dari terbatasnya jangkauan layanan program ke desa-desa, tingkat output yang belum dimanfaatkan dengan baik, kesiapan sumber daya manusia tenaga pelaksana yang belum memadai, pencapaian tujuan program, pemanfaatan hasil pelatihan program, dan tindak keberhasilan program yang belum tercapai secara menyeluruh, serta tindak lanjut pasca setelah pelatihan atau pembinaan yang belum efektif. Adapun aspek yang cukup efektif yaitu tingkat input, struktur organisasi yang jelas, dan koordinasi antarbagian. Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama faktor pendukung adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan program. Kedua, faktor penghambat yaitu belum meratanya jangkauan program, keterbatasan anggaran program, keterbatasan sumber daya manusia pustakawan, partisipasi masyarakat, dan kurangnya pendampingan dan pembinaan lanjutan setelah pelatihan.

Kata Kunci: Efektivitas, Perpustakaan, Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

The development of literacy based on social inclusion is a library service approach aimed at improving the quality of life of the community through a social inclusion-based library transformation program tailored to local needs. In Hulu Sungai Utara Regency, the Library Service has implemented this program since 2021 until the present. The purpose of this research is to determine the effectiveness of the development of social inclusion-based literacy at the Library Service of Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a descriptive qualitative type. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data sources were obtained through snowball sampling, involving 23 people. After the data were collected, they were analyzed using techniques that include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Meanwhile, data creditor tests are carried out by extension of observation, increasing perseverance, triangulation, negative case analysis, using reference materials, and holding members checking. The results of the study show that the effectiveness of the program is still less effective, as seen from the limited reach of the program services to villages, the level of output that has not been well utilized, the readiness of human resources among the implementing personnel that is still inadequate, the achievement of program objectives, the utilization of the results of program training, and the level of program success that has not been fully achieved, as well as the follow-up after training or coaching that is still ineffective. The aspects considered quite effective include the level of input, a clear organizational structure, and coordination between sections. In addition, the influencing factors consist of: first, supporting factors such as support from the Regional Government and Village Government, as well as the availability of facilities and infrastructure for program training; second, inhibiting factors such as the uneven reach of the program, limited program budget, limited number of

librarian human resources, community participation, and lack of follow-up assistance and coaching after training.

Keyword: *Effectiveness, Library, Hulu Sungai Utara*

PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan lembaga yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh informasi. Sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, perpustakaan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Peran perpustakaan tidak hanya terbatas pada penyediaan buku, tetapi juga dalam meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai program literasi dan edukasi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan budaya literasi, melalui program nasional seperti Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) pada tahun 2016 untuk penguatan literasi di berbagai lingkungan.

Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan literasi masyarakat adalah Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) berbasis inklusi sosial. Pendekatan ini juga tercantum dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang terbuka bagi semua kalangan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial, maupun fisik. Implementasi Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, serta peningkatan partisipasi publik dalam kegiatan literasi.

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterampilan berbasis literasi, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Kegiatan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial seperti pelatihan kewirausahaan, pembuatan produk kreatif, serta keterampilan digital bagi pelaku usaha kecil.

Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai mengembangkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2021 hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan pada Pasal 36 mengenai Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan seperti pelatihan tata boga, anyaman purun, menjahit, batik tulis, batik tenun ikat, solam bolang, fotografer, komputer, make up, potong rambut, buket, story telling, hingga pengemasan produk, yang ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 19 desa dengan 32 kegiatan inklusi mulai tahun 2021 hingga 2024 dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Selatan, dan Kecamatan Amuntai Utara.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya: pertama, implementasi pengembangan literasi berbasis inklusi sosial masih terbatas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa yang jauh dari pusat kota atau dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dana, waktu,

dan tenaga pelaksana, membuat Dinas Perpustakaan membatasi jumlah program yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga program belum sepenuhnya dapat menjangkau masyarakat. (*Sumber: Data kegiatan Program Inklusi Sosial tahun 2021-2024*). Kedua, kapasitas sumber daya manusia pustakawan belum memadai untuk melaksanakan sosialisasi ke desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Koordinasi antara dinas dan desa dilakukan melalui aplikasi WhatsApp serta surat pemberitahuan pelatihan inklusi sosial. (*Sumber: Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Surat Pemberitahuan Kegiatan Pelatihan Inklusi Sosial ke Desa*). Ketiga, kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial hanya berfokus pada pelatihan, tanpa disertai dukungan permodalan serta bimbingan mengenai cara memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan. Banyak peserta pelatihan telah memiliki keterampilan baru, seperti membuat kerajinan tangan, memasak, atau mengembangkan usaha kecil. Namun setelah pelatihan, mereka bingung dalam memasarkan produk atau jasa tersebut. Sebagian masyarakat mampu memproduksi barang, tetapi tidak memahami strategi pemasarannya. Di sisi lain, ada juga yang memiliki pengetahuan produksi dan pemasaran, tetapi terkendala modal untuk memulai usaha. (*Sumber: Data Nama-Nama Peserta yang Berhasil Mengembangkan Pelatihan Inklusi Sosial*). Dan keempat, kurangnya pemantuan dan pembinaan dari Dinas Perpustakaan dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial setelah pelatihan. Dan tingkat keberhasilan program belum tercapai sepenuhnya karena masih ada beberapa desa yang belum terjangkau dan tau program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. (*Sumber: Buku Tamu Administrasi Desa*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian terdahulu Aulia Saputra (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Bayur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program di Desa Bayur menunjukkan hasil cukup efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun belum mampu mencapai kepuasan masyarakat secara menyeluruh karena tidak ada tindak lanjut program secara berkelanjutan. Penelitian Muhammad Khalid (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Waringin Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara” disimpulkan bahwa di Desa Waringin menunjukkan ada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan dana, serta faktor alam turut menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan.

Menurut Supriyono dalam (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, dan Yusriati, 2018:40), efektivitas diartikan sebagai sejauh mana hasil yang dicapai oleh suatu unit tanggung jawab sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Suatu unit dapat disebut efektif apabila hasil yang dihasilkan memiliki kontribusi besar terhadap tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Penelitian ini menggunakan teori Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et al*, 2018:59-60) untuk mengukur efektivitas suatu program, yaitu: pertama, Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedua, sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informan mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Ketiga, tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan keempat, pemantuan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa pernyataan lisan maupun tulisan dari subjek yang diamati secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Jumlah informan diambil sebanyak 23 orang dengan melalui penarikan sampel secara *snowball sampling* yaitu suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi (Sugiyono, 2021). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas data dengan cara memperpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisa kasus negatif, bahan referensi, dan mengadakan *member check* (Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur bagaimana efektivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti menggunakan teori efektivitas menurut Budiani dalam (Dedi Amrizal, *et al*, 2018:59-60).

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

a. Jangkauan layanan program ke desa-desa

Jangkauan layanan program adalah sejauh mana suatu program atau layanan dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh sasaran atau penerima program yaitu masyarakat desa. Ini mencakup tidak hanya keterbatasan fisik program di suatu wilayah, tetapi juga kemudahan akses, pemahaman masyarakat terhadap isi program, serta partisipasi mereka dalam kegiatan yang dilaksanakan. Semakin luas dan merata jangkauan layanan, maka semakin besar pula kemungkinan program tersebut berhasil mencapai tujuannya,

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai jangkauan layanan program ke desa-desa sudah berjalan, tetapi kurang efektif untuk mencapai tujuan, pemanfaatan potensi, sumber daya atau prosesnya, karena jangkauan layanan belum sepenuhnya merata ke seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini terlihat dari jangkauan layanan yang belum maksimal menjangkau seluruh desa yang mengusulkan proposal, serta proses realisasi program yang memakan waktu cukup lama (sekitar satu tahun), dan belum tentu semua proposal diterima maupun tidak. Oleh karena itu, ketepatan sasaran program masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi agar pengembangan literasi berbasis inklusi sosial benar-benar merata dan efektif di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Tingkat input dan output

Tingkat input pada program ini meliputi semua sumber daya yang disiapkan untuk menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial seperti

dana operasional, tenaga pelaksana, sarana penunjang, serta dukungan dari lembaga terkait. Tingkat output adalah hasil langsung dari pelaksanaan program tersebut, berupa kegiatan pelatihan literasi, pembentukan kelompok literasi, dan pelatihan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan cukup efektif pada tingkat input karena tersedianya seperti alat, bahan, tempat pelatihan, dan peserta namun pada tingkat output kurang efektif karena setelah pelatihan tidak semua desa melanjutkan kegiatan secara berkelanjutan seperti pembentukan kelompok belajar literasi.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informan mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

a. Struktur organisasi yang jelas

Struktur organisasi adalah susunan atau pengaturan posisi, tugas, dan tanggung jawab dalam suatu lembaga atau instansi, agar setiap orang tahu perannya dan alur kerja menjadi jelas dan setiap bagian dapat bekerja secara terarah dan terkoordinasi. Struktur organisasi yang jelas akan menunjukkan siapa yang memimpin, siapa yang melaksanakan, serta bagaimana hubungan kerja antarbagian dalam instansi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan cukup efektif dalam struktur organisasi, karena hal ini dalam peran masing-masing struktur sudah berjalan sesuai fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pendampingan selama kegiatan.

b. Kesiapan sumber daya manusia pelaksana program

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana program adalah sejauh mana orang-orang yang terlibat dalam menjalankan suatu program memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang mendukung keberhasilan program. Dalam hal ini, kesiapan sumber daya manusia mencakup beberapa hal penting, seperti tingkat pendidikan, keterampilan teknis, pengalaman kerja, pemahaman terhadap tujuan program, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Sumber daya manusia yang siap tidak hanya mampu menjalankan tugas sesuai prosedur, tetapi juga bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam program berbasis inklusi sosial yang menuntut empati, keterbukaan, dan kemampuan membangun partisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai kesiapan sumber daya manusia pelaksana program kurang efektif dari kesiapan sumber daya manusia pustakawan yang belum memadai dalam menyosialisasikan atau memperluas jangkauan layanan program ke masyarakat karena banyaknya tugas dan kegiatan-kegiatan perpustakaan lakukan, dari peserta yang menyesuaikan keadaan urusan rumah dan pekerjaan untuk mengikuti pelatihan. Sedangkan dari narasumber mengikuti arahan sesuai yang diarah oleh Dinas Perpustakaan karena ada kontrak kerja yang dilaksanakan dan membimbing peserta dalam membuat dan mengolah suatu bahan.

c. Koordinasi antarbagian

Koordinasi antarbagian adalah proses menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara satu bagian dengan bagian lainnya dalam sebuah organisasi agar program atau kegiatan dapat berjalan secara teratur dan efisien. Dalam pelaksanaan program, setiap bagian biasanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga koordinasi diperlukan untuk menyatukan langkah dan menghindari tumpang tindih pekerjaan. Melalui koordinasi yang baik, setiap bagian dapat saling mendukung, berbagi informasi, menyelesaikan masalah bersama, serta memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai koordinasi antarbagian cukup efektif, karena dalam koordinasi ini saling terhubung melewati aplikasi WhatsApp baik group maupun chat pribadi untuk menjalin komunikasi. Setelah itu, jika melaksanakan pelatihan di desa, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mengeluarkan surat pemberitahuan pelatihan inklusi sosial ke desa yang melaksanakan pelatihan.

3. Tujuan program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Pencapaian tujuan program

Pencapaian tujuan program adalah hasil akhir yang menunjukkan sejauh mana suatu program berhasil mencapai sasaran yang telah direncanakan sejak awal. Hal ini dapat dilihat dari apakah kegiatan yang dilakukan mampu memberikan dampak positif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah memberikan dampak positif dan keberhasilan awal, tetapi cakupan pelaksanaan program masih terbatas. Sehingga, pencapaian tujuan program bisa dikatakan kurang efektif secara menyeluruh karena masih terbatas pada desa-desa tertentu saja.

b. Pemanfaatan hasil pelatihan program

Pemanfaatan hasil pelatihan program adalah peserta pelatihan mampu menerapkan ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan ke dalam kegiatan nyata di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pemanfaatan hasil pelatihan program kurang efektif, karena hanya sebagian peserta yang melanjutkan dan mengembangkan keterampilannya setelah mengikuti pelatihan. Pelatihan literasi berbasis inklusi sosial telah memberikan manfaat langsung kepada peserta berupa keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal. Namun, efektivitas jangka panjang belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya hambatan dalam pengembangan usaha lanjutan, terutama pada permodalan dan pendampingan pasca pelatihan. Oleh karena itu, meskipun program dinilai bermanfaat dan relevan, keberlanjutan manfaatnya sangat ditentukan oleh upaya masyarakat sendiri serta dukungan dari desa dan dinas.

4. Pemantuan program

Pemantuan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

a. Tindak lanjut pasca pelatihan atau pembinaan

Tindak lanjut pasca pelatihan atau pembinaan program adalah langkah-langkah yang dilakukan setelah pelatihan selesai untuk memastikan bahwa ilmu dan keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata. Tindak lanjut ini sangat penting agar pelatihan tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar mendukung keberhasilan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai tindak lanjut pasca pelatihan atau pembinaan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung fase lanjutan dari pemberdayaan masyarakat berbasis literasi inklusi sosial.

b. Tingkat keberhasilan program

Tingkat keberhasilan program adalah ukuran atau gambaran sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat nyata kepada sasaran yang dituju.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai tingkat keberhasilan program kurang efektif, karena cuma beberapa peserta yang berhasil untuk mengembangkannya lebih lanjut dan sebagian tidak. Dan beberapa peserta menyebutkan kendala seperti kurangnya alat, modal, serta tidak adanya pendampingan lanjutan setelah pelatihan, sehingga keberhasilan program belum dapat dikatakan berhasil secara menyeluruh.

B. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam suatu program yang dibentuk dan dijalankan pasti ada faktor yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala sesuatu yang berperan dalam memperlancar, memfasilitasi, memperkuat, serta memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan suatu program.

a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan salah satu keberhasilan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Pemerintah Daerah berperan dalam menyediakan kebijakan, pendanaan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program literasi di perpustakaan daerah maupun Pemerintah Desa. Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator dan mendukung kegiatan pelatihan seperti menyediakan tempat pelatihan dan peserta. Dukungan ini adalah bentuk nyata dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program ini didukung oleh kerja sama antara pemerintah, perpustakaan, dan masyarakat. Dukungan anggaran dan fasilitas berjalan seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan program

Ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan program kegiatan literasi dan pelatihan, sangat terbantu dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang pelatihan, komputer, internet, proyektor, meja kursi, serta alat dan bahan pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Dukungan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan desa menciptakan suasana pelatihan yang tertata dan mendukung partisipasi aktif masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan segala bentuk kendala atau unsur yang dapat memperlambat, membatasi, atau menghentikan proses pencapaian tujuan dalam suatu program.

a. Belum meratanya jangkauan program

Pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum menjangkau seluruh desa, terutama wilayah terpencil atau desa yang sulit diakses. Akibatnya, sebagian masyarakat belum dapat merasakan manfaat program ini secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan jangkauan program disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya tenaga pustakawan, anggaran yang terbatas, dan lokasi desa yang sulit diakses. Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap berjalan dan direncanakan akan diperluas secara bertahap agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Keterbatasan anggaran program

Dana yang tersedia untuk melaksanakan program belum mencukupi untuk menjangkau lebih luas wilayah sasaran dan memperbanyak jenis kegiatan pelatihan serta keterbatasan anggaran program untuk kegiatan lanjutan dana yang tersedia hanya cukup untuk melaksanakan kegiatan inti, seperti pelatihannya saja, tetapi belum mencakup kebutuhan untuk melakukan tindak lanjut atau pembinaan berkelanjutan pasca pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran program menjadi salah satu kendala dalam memperluas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Perpustakaan telah berupaya melaksanakan pelatihan semaksimal mungkin, tetapi keterbatasan dana membuat pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan belum menyeluruh ke semua desa-desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Keterbatasan sumber daya manusia pustakawan

Pustakawan atau pelaksana program masih terbatas dan beberapa di antaranya merangkap tugas lain. Hal ini berdampak pada kurangnya tenaga yang fokus mengelola

dan melaksanakan program secara efektif, sehingga efektivitas kegiatan menjadi tidak kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kurangnya jumlah pustakawan dan beban kerja yang tinggi menjadi penghambat efektivitas program.

d. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung dan mengikuti kegiatan perpustakaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi ini dapat berupa kehadiran dalam pelatihan keterampilan, keterlibatan dalam diskusi atau forum masyarakat, serta penerapan hasil pelatihan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelatihan cukup antusias, tetapi masih terkendala oleh waktu dan kesibukan masyarakat seperti musim tanam atau panen di sawah atau pun kesibukan pribadi.

e. Kurangnya pendampingan dan pembinaan lanjutan setelah pelatihan

Kurangnya pendampingan dan pembinaan lanjutan setelah pelatihan menghambat peserta pelatihan dalam mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh, karena setelah kegiatan selesai, tidak ada bimbingan atau tindak lanjut yang membantu peserta menerapkan ilmu secara berkelanjutan dengan sebatas pelatihannya saja tidak dalam pengembangan usaha pada permodalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendampingan setelah pelatihan menjadi kendala dalam pengembangan keterampilan peserta. Program hanya sebatas pelatihan awal, tanpa dukungan lanjutan seperti pembinaan usaha atau bantuan alat dan modal, sehingga manfaat pelatihan belum dirasakan secara maksimal oleh peserta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang efektif. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yaitu: pertama, sub variabel ketepatan sasaran program, dilihat dari indikator jangkauan layanan program ke desa-desa yang kurang efektif karena jangkauan layanan belum sepenuhnya merata ke seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, lalu indikator tingkat input yang cukup efektif karena tersedianya seperti alat, bahan, tempat pelatihan, dan peserta namun pada tingkat output kurang efektif karena setelah pelatihan tidak semua desa melanjutkan kegiatan secara berkelanjutan seperti pembentukan kelompok belajar literasi. Kedua, sub variabel sosialisasi program, pada indikator struktur organisasi yang jelas cukup efektif karena berjalan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, indikator kesiapan sumber daya manusia pelaksana program kurang efektif karena banyaknya tugas dan kegiatan-kegiatan perpustakaan lakukan, dari peserta yang menyesuaikan keadaan urusan rumah dan pekerjaan untuk mengikuti pelatihan dan dari narasumber mengikuti arahan sesuai yang diarah oleh Dinas Perpustakaan karena ada kontrak kerja yang dilaksanakan dan membimbing peserta dalam membuat dan mengolah suatu bahan, dan indikator koordinasi antarbagian yang terjalin cukup efektif dalam koordinasi dan komunikasi. Ketiga, sub variabel tujuan program, dilihat dari indikator pencapaian tujuan program kurang efektif karena cakupan pelaksanaan program masih terbatas, dan indikator pemanfaatan hasil pelatihan

program kurang efektif karena hanya sebagian peserta yang melanjutkan dan mengembangkan keterampilannya setelah mengikuti pelatihan. Keempat, sub variabel pemantuan program, dilihat dari indikator tindak lanjut pasca pelatihan atau pembinaan belum efektif karena tidak adanya tidak lanjutan setelah pelatihan dan indikator pada tingkat keberhasilan program kurang efektif karena cuma beberapa peserta yang berhasil untuk mengembangkannya lebih lanjut dan sebagian tidak sehingga tingkat keberhasilan program tidak sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendukung; adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan program. Kedua, faktor penghambat meliputi; belum meratanya jangkauan layanan program, keterbatasan anggaran program, keterbatasan sumber daya manusia pustakawan, partisipasi masyarakat, dan kurangnya pendampingan dan pembinaan lanjutan setelah pelatihan.

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Bidang Perpustakaan, dan Pustakawan yaitu pertama, meningkatkan jangkauan program. Kedua, sosialisasi program perlu diperkuat melalui berbagai media informasi, seperti media sosial, spanduk, dan penyuluhan langsung ke desa-desa sebelum dilakukan nya praktek langsung ke masyarakat, agar masyarakat tahu apa tujuan dan manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia pelaksana program yang dibentuk perlu ditingkatkan lagi karena banyak nya tugas dan kegiatan-kegiatan perpustakaan lakukan. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan secara baik mengenai jadwal kegiatan serta penambahan jumlah tenaga pelaksana untuk kegiatan pelatihan inklusi sosial. Dan keempat, perlu adanya membangun sistem pembinaan berkelanjutan setelah pelatihan. Pemerintah Desa diharapkan memberikan dukungan dan membentuk kolaborasi literasi ke program desa seperti BUMDes, bazar produk lokal, atau kegiatan kewirausahaan. Sedangkan peserta atau masyarakat diharapkan dapat mengikuti setiap kegiatan pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menerapkan keterampilan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anomin. *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.*
- Anomin. *Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.*
- Dedi, A., Dalimunthe, Hidayah, A., & Yusrianti. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada.* Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Riki, N., Puteri, A., Solihah, A., Maryanto, Nugroho, M., & Riswara, Y. (2024). *Memperkuat Literasi Indonesia: Menuju Bangsa yang Maju dan Bermanfaat.* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Administrasi.* Edisi 3. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif.* Edisi 3. Bandung: Alfabeta.